

**PENGARUH PAD, DAU, DBH, DAK, PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAN PENANAMAN MODAL TETAP BRUTO
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH
PROVINSI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA**

The Effect Original Local Government Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Revenue Sharing Funds (DBH), Special Allocation Fund (DAK), and Gross Fixed Capital Formation (PMTB) on Capital Expenditure Allocation in The Provinces of The Western (KBI) and Eastern Regions of Indonesia (KTI)

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

Government policy to prioritize infrastructure development is not only to increase competitiveness, but also to reduce disparities between regions in Indonesia. The success of infrastructure development requires the role of the central government, regional government, and the private sector. The role of the regional government is realized in the form of capital expenditure allocations in the regional budget. The 2014-2019 RPJMN has set a capital expenditure allocation target in the APBD of 30 persen of total regional expenditure. But in its implementation, not all regions have fulfilled this mandate. This study discusses factors that influence the allocation of capital expenditure in the provinces of the western (KBI) and eastern regions of Indonesia (KTI). The data used is accumulated data on Local Budget (APBD) and Regional GDP for the 2010-2017 period in the provinces in the western and eastern regions of Indonesia. The methodology used is data panel regression using fixed effect model. The aim of the study is to formulate a policy of allocating budget transfers to regions that is more effective in narrowing the gap between the western and eastern regions of Indonesia. The results of Fixed Effect Model show that all variables have a positive effect on government capital expenditure allocation at KBI and KTI. General Allocation Fund (DAU) and Gross fixed capital formation (PMTB) have a positive relationship but do not significantly affect capital expenditure allocation in the KTI and KBI regions.

Keywords: Capital expenditure, gap, balance funds, fixed effect model

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

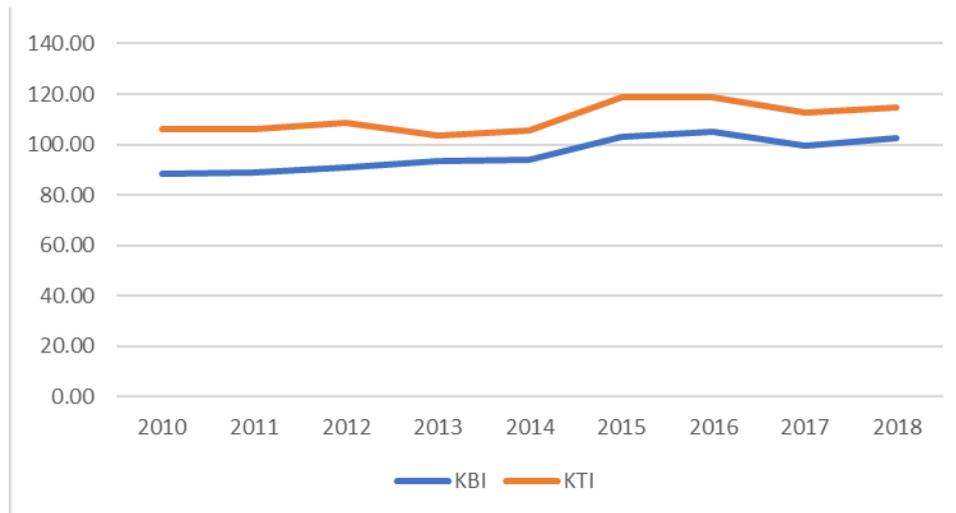
Salah satu tantangan dalam pembangunan nasional adalah ketersediaan infrastruktur yang terbatas, yang selama ini menjadi hambatan utama untuk memanfaatkan peluang investasi dan menjadi salah satu penyebab mahal biaya logistik. Walaupun infrastruktur memadai, keberadaannya masih terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan seperti Sumatera dan Jawa. Tak mengherankan karena kedua pulau ini terus menjadi wilayah utama yang paling berkontribusi pada pembentukan PDB atau pertumbuhan ekonomi Indonesia (Tabel 1).

Tabel 1. Peranan Wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional, 2010-2016 (Persen)

Pulau/wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatera	23,1	23,6	23,1	23,1	23	22,2	22
Jawa	58,1	57,6	56,7	57,1	57,4	58,3	58,5
Bali dan Nusa Tenggara	2,7	2,6	2,8	2,8	2,9	3,1	3,1
Kalimantan	9,1	9,5	9,7	9,2	8,8	8,2	7,9
Sulawesi, Maluku, dan Papua	6,9	6,7	7,8	7,8	7,9	8,2	8,5
	100						

Sumber: BPS, diolah

Dominasi kedua pulau ini tentunya membawa konsekuensi pada persebaran infrastruktur yang tidak merata antarwilayah. Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesenjangan infrastruktur antarwilayah, seperti bidang pendidikan, kesehatan, yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Data lainnya misalkan, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang juga menggambarkan tingkat kesulitan akses dan ketersediaan barang baku/input produksi di suatu wilayah. Data rata-rata IKK selama tahun 2010 hingga 2018 masih menempatkan kawasan timur Indonesia sebagai wilayah dengan angka indeks yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat Indonesia (gambar 1), yang secara tidak langsung menggambarkan tingginya harga bahan baku/input akibat tingginya biaya logistik/distribusi dan sulitnya akses ke wilayah tersebut.

Gambar 1. Indeks Kemahalan Konstruksi KBI dan KTI, tahun 2010-2018

Sumber: BPS, diolah

Keberhasilan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan wilayah tidak saja membutuhkan dana yang besar namun juga kerja sama antara pemerintah pusat, sektor swasta, dan juga pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat pusat (nasional) dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antarwilayah di dalam negeri. Akibatnya daerah menjadi sangat tertinggal dalam pembangunan infrastrukturnya. Kerjasama dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal dalam APBD. Belanja modal ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Karenanya, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target rata-rata belanja modal kabupaten/kota dan provinsi sebesar 30 persen dari belanja daerah di tahun 2019 dari masing-masing sebesar 19,9 persen dan 16,2 persen di tahun 2014. Meskipun memang belum sepenuhnya daerah mengalokasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan, namun pemerintah memberikan tahapan pengalokasiannya hingga mencapai target 30 persen dari belanja APBD pada tahun 2019 ini.

Dalam tiga tahun terakhir alokasi belanja modal dalam APBD secara nasional masih berkisar pada angka 20-22 persen dari total belanja daerah. Bahkan di awal

tahun ini pemerintah menyoroti masih minimnya alokasi belanja modal Pemerintah Daerah, yang hanya mencapai 19 persen dari total belanja daerah. Pemerintah daerah masih mengutamakan anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur.¹ Oleh karena itu, dalam setiap pedoman penyusunan RAPBD pemerintah pusat senantiasa mengharapkan daerah untuk memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal menjadi fokus penelitian untuk mengidentifikasi variabel penyebabnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini terfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja modal berdasarkan kemampuan penerimaan daerah dalam APBD.

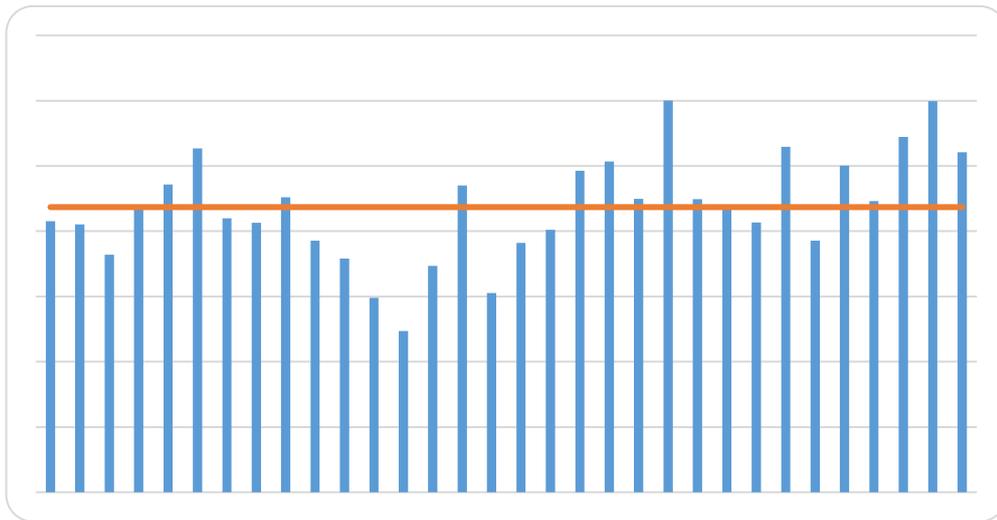
Penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Melihat pengaruh variabel PAD, DAU, DBH, DAK, penerimaan pembiayaan dan Penanam Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap alokasi Belanja Modal di daerah provinsi Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.
2. Memberikan masukan kebijakan afirmasi khusus bagi daerah provinsi di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia untuk meningkatkan porsi belanja modal pemerintah daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target rata-rata belanja modal Kab/Kota dan Provinsi sebesar 30 persen dari belanja daerah di tahun 2019 dari masing-masing sebesar 19,9 persen dan 16,2 persen di tahun 2014 sebagai *baseline* (gambar 2).

¹ Reily, Michael, diambil kembali dari "Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim", diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang-minim>, pada tanggal 18 April 2019.

Gambar 2. Rata-rata persentase belanja modal tahun 2010-2017

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:²

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan

² Syaiful, SE, Ak., MM, diambil kembali dari "Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan" diakses dari <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen transfer ke daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase tertentu atau bobot perhitungan untuk masing-masing komponen. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU

tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.³

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.⁴

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.⁵

3. Metode Penelitian.

3.1. Jenis penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2010-2017, dan

³ Kementerian Keuangan RI. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia. Edisi II*

⁴ Kementerian Dalam Negeri. Bab IV: Kebijakan Akuntansi Pembiayaan dalam <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual/modul2/04.Kebijakan-Akuntansi-Pembiayaan.pdf>

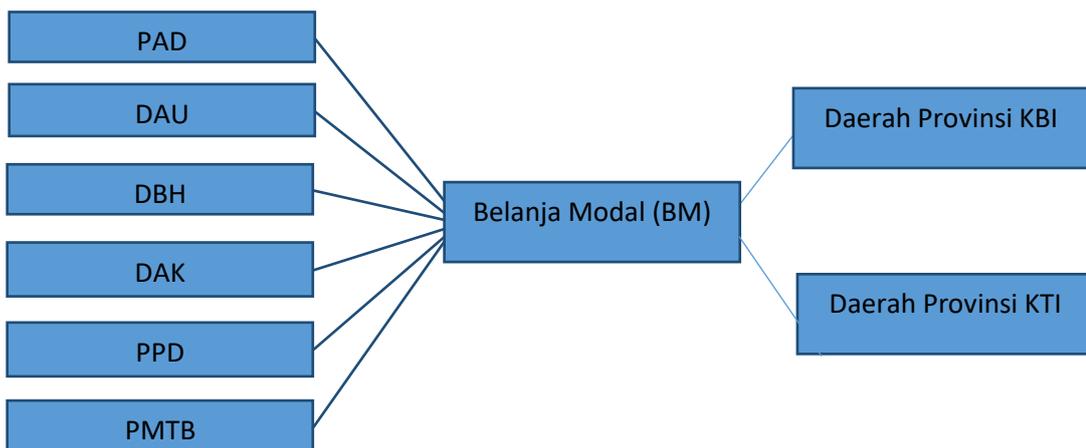
⁵ <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>

data *cross section* yang terdiri atas 32 daerah provinsi yang terdiri dari 16 daerah provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dua daerah provinsi yang tidak masuk dalam perhitungan adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara disebabkan kinerja keuangannya sudah melebihi rata-rata daerah lain (DKI Jakarta) dan daerah otonomi baru (Kalimantan Utara). Data keuangan daerah seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi tahun 2010-2017 yang diterbitkan oleh BPS, Nota Keuangan publikasi Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

3.2. Model Penelitian

Model persamaan pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, Penerimaan pembiayaan (PPD) dan PMTB terhadap Belanja Modal di Daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Hubungan Variabel dalam model persamaan



Dari gambar tersebut, skema hubungan antar variabel dalam persamaan adalah sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 PPD_{it} + \beta_6 PMTB_t + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal (dalam milyar rupiah)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar rupiah)
- DAU = Dana Alokasi Umum (dalam milyar rupiah)
- DBH = Dana Bagi Hasil (dalam milyar rupiah)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (dalam milyar rupiah)
- PPD = Penerimaan Pembiayaan Daerah (dalam milyar rupiah)
- PMTB = Penanaman Modal Tetap Bruto (dalam milyar rupiah)

$\beta_1- \beta_3$ = Koefisiensi
i = cross section
t = time series
 ε_i = error term

3.3. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dirangkum oleh penulis terkait dengan belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu mengenai Belanja Modal

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1.	Aulia Livianisa (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • SiLPA APBD Klaster A • Saldo Akhir LAK Klaster A • DAU Klaster A • DAK Klaster A 	<ul style="list-style-type: none"> • SiLPA Pemprov pada Klaster A memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal • Saldo Akhir LAK pemprov klaster A memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. • DAU pemerintah provinsi pada klaster A tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. • DAK pemerintah provinsi pada klaster A tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. • SiLPA, Saldo Akhir Kas LAK, DAU, dan DAK pemerintah provinsi pada klaster A secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2.	Sugiyanta (2016)	Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian daerah DAU DAK DBH Belanja Pegawai SiLPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh positif Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal • Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap Belanja Modal • Terdapat pengaruh positif DAK terhadap Belanja Modal

				<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh negatif DBH terhadap Belanja Modal • Terdapat pengaruh negatif Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal • Terdapat pengaruh positif SiLPa terhadap Belanja Modal
3.	Retno Widyawati (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal	PAD, DBH, DAK, belanja pegawai, SiLPA	<ul style="list-style-type: none"> • (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Belanja pegawai berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

3.4. Hubungan Antar Variabel

Hubungan antara DAU, DBH, DAK, PPD, dan PMTB terhadap belanja modal, sebagai berikut:

1. Hubungan DAU, DBH, dan DAK terhadap belanja modal

Secara umum dana transfer pusat dari APBN ke daerah berdasarkan sifat penggunaannya dikelompokkan menjadi *block grant* dan *specific grant*. DAU dan DBH merupakan *block grant* yang tujuan penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk memenuhi prioritas belanjanya. Tanpa melihat kecukupan alokasinya, pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja modal melalui DAU dan DBH, setelah prioritas belanja daerah yang sifatnya rutin terpenuhi. Sementara DAK yang bersifat *specific grant* pemanfaatannya diarahkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan fisik sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK secara langsung akan meningkatkan belanja modal karena ada penambahan aset bagi daerah dan

kewajiban daerah untuk mengalokasikan biaya pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya.

2. Hubungan PPD terhadap belanja modal

Komponen PPD antara lain adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) daerah yang peruntukannya antara lain untuk membiayai belanja daerah dan menutup defisit belanja daerah. Penggunaannya diserahkan kepada prioritas masing-masing daerah. Dalam hal pembiayaan prioritas belanja rutin daerah sudah terpenuhi melalui dana transfer pusat ke daerah, maka sumber alokasi belanja modal tergantung pada besarnya PPD.

3. Hubungan PMTB terhadap belanja modal.

Dari sisi institusi, PMTB dapat berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari sektor swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Peningkatan investasi melalui PMDN/PMA akan mendorong daerah meningkatkan alokasi belanja modal untuk mempermudah masuknya investasi dari dalam/luar daerah.

3.5. Teknis Analisis Data Panel

Teknik analisis ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu tertentu. Dengan kata+ lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas-waktu (*time-series*) dan data lintas-individu (*cross-section*).⁶

4. Hasil pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu uji *Chow-test*, uji *Hausman Test*, dan uji *Lagrange Multiplier Test*.

⁶ Ekananda, Mahyus,; Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2.

4.1.1. Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Chow-test untuk menentukan apakah *common effect model (CEM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika Chi Square $> 0,05$, maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika Chi Square $< 0,05$, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Hasil uji Chow test diberikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Chow-test

Effects Test	KBI			KTI		
	Statistic	d.f.	Prob.	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.774470	(15,106)	0.0000	11.789521	(15,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.436009	15	0.0000	125.625885	15	0.0000

Sumber: BPS, (data diolah)

Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan baik F test maupun Chi-square daerah provinsi di KBI dan KTI signifikan (p-value 0,000 lebih kecil dari 5 persen) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti **Fixed Effect**. Namun sebelum menentukan model terpilih, terlebih dahulu menguji model dengan *Random Effect*.

4.1.2. Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman-test untuk menentukan apakah *random effect model (REM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika Chi Square $> 0,05$, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika Chi Square $< 0,05$, maka Tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat. Adapun hasil uji Hausman diberikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	KBI			KTI		
	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	91.954357	6	0.0000	42.418916	6	0.0000

Sumber: BPS, (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (p-value 0,0000 kurang dari 0,05 persen), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model mengikuti **Fixed Effect (Tabel 4).**

Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini, model FE lebih baik daripada model RE dan CE, sehingga tidak harus dilakukan uji selanjutnya (*Lagrange Multiplier Test*).

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Dalam kasus data panel, dimana struktur dan sifat datanya seringkali memiliki hubungan/korelasi dengan data sebelumnya, maka tidak seluruh uji asumsi klasik dapat dilakukan untuk model data panel. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Dengan demikian uji asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi data panel hanya uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF). Pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF adalah yaitu jika nilai VIF < 10,0 artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi, dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas diberikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji Multikolinieritas Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Variable (KBI)	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(PAD+2)	0.004740	1297.430	7.984527
LOG(DAK+2)	0.001339	313.3595	3.669860
LOG(DAU+2)	0.000519	200.4456	1.332580
LOG(DBH+2)	0.002140	529.6990	1.203081
LOG(PPD+2)	0.001719	455.0560	2.469508
LOG(PMTB+2)	0.033534	19972.98	4.116250
C	3.483588	17023.96	NA

Variable (KTI)	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(PAD+2)	0.004655	1544.984	9.149875
LOG(DAK+2)	0.001180	455.7941	3.911693
LOG(DAU+2)	0.015093	9168.827	8.090236
LOG(DBH+2)	0.003036	1053.745	1.055135
LOG(PPD+2)	0.001183	428.5810	1.837458
LOG(PMTB+2)	0.033880	27142.54	8.790508
C	1.863765	15205.21	NA

Sumber: BPS, (data diolah)

Pada Tabel 5 dapat diperhatikan nilai *Centered* VIF menunjukkan kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya CE dan FE saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi CE dan FE masih menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* sedangkan RE sudah menggunakan *Generalize Least Square (GLS)* yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.

Untuk membandingkan apakah model FE terpilih terjadi heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil antara model FE tanpa pembobotan (*unweighted*) dan model FE dengan pembobotan (*weighted*). Hasil perbandingan model FE ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Model FE Unweighted dan Weighted

Parameter	KBI		KTI	
	Unweighted	Weighted	Unweighted	Weighted
Prob. t-Statistic				
LOG(PAD+2)	0.0000	0.0000	0.0030	0.0023
LOG(DAK+2)	0.0963	0.0009	0.0002	0.0000
LOG(DAU+2)	0.9737	0.9751	0.3705	0.4940
LOG(DBH+2)	0.0001	0.0000	0.1418	0.3738
LOG(PPD+2)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LOG(PMTB+2)	0.3210	0.1666	0.0018	0.1656
R-squared	0.973516	0.987303	0.974087	0.976718

Prob (F-statistic)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
--------------------	----------	----------	----------	----------

Sumber: BPS, (data diolah)

Dengan melihat perbandingan terhadap 3 indikator pada tabel diatas, terlihat bahwa Model FE dengan pembobotan merupakan model yang lebih baik karena memiliki nilai prob t-Stat < 0,05 untuk semua variabel yang diobservasi dan memiliki R *squared* lebih tinggi, yang telah terbebas dari heteroskedastisitas. Model inilah yang akan digunakan untuk estimasi.

4.4. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik, dan uji koefisien determinasi (R²). Hasilnya dari uji F dan uji t diberikan pada Tabel 7 dan 8 berikut ini.

4.4.1. Uji F-statistik

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F-stat

KBI			KTI		
Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan	Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan
471.2710	0.000000	Signifikan	211.7542	0.000000	Signifikan
Daerah kritis Ho ditolak jika p-value < $\alpha = 0,05$					

Sumber: BPS, (data diolah)

Pada Tabel 7 diatas dapat diperhatikan nilai p-value $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap *variable dependen*.

4.4.2. Uji t-statistik

Uji *t-statistic* dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian *t-statistic* adalah:

H_0 : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas nilai $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai $t_{hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen (lihat Tabel 8).

Tabel 8. Hasil Regresi Model FE Weighted KBI dan KTI

KBI					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LOG(PAD+2)	0.539746	0.050308	10.72890	0.0000	Signifikan
LOG(DAK+2)	0.079653	0.023278	3.421868	0.0009	Signifikan
LOG(DAU+2)	0.000769	0.024596	0.031274	0.9751	Tidak signifikan
LOG(DBH+2)	0.194166	0.044387	4.374391	0.0000	Signifikan
LOG(PPD+2)	0.239781	0.031114	7.706634	0.0000	Signifikan
LOG(PMTB+2)	0.205151	0.147288	1.392860	0.1666	Tidak signifikan
C	-1.899217	1.455309	-1.305027	0.1947	
KTI					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LOG(PAD+2)	0.184821	0.059209	3.121519	0.0023	Signifikan
LOG(DAK+2)	0.194304	0.027500	7.065607	0.0000	Signifikan
LOG(DAU+2)	0.089139	0.129862	0.686413	0.4940	Tidak signifikan
LOG(DBH+2)	0.040409	0.045238	0.893233	0.3738	Tidak signifikan
LOG(PPD+2)	0.173179	0.027874	6.212923	0.0000	Signifikan
LOG(PMTB+2)	0.230190	0.164895	1.395978	0.1656	Tidak signifikan
C	0.884396	1.204346	0.734337	0.4644	

Sumber: BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa:

- Di Kawasan Barat Indonesia, semua variabel indenpenden memiliki hubungan searah (positif) terhadap variabel dependen. Variabel yang signifikan berpengaruh terhadap variabel belanja modal, adalah PAD, DAK, DBH, dan PPD dengan nilai p-value yang lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, sementara variabel DAU dan PMTB tidak signifikan mempengaruhi variabel belanja modal.
- Di Kawasan Timur Indonesia, semua variabel independen memiliki hubungan searah (positif) terhadap variabel dependen. Variabel yang signifikan berpengaruh terhadap variabel belanja modal, adalah PAD, DAK, dan PPD dengan nilai p-value yang lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, sementara variabel DAU, DBH dan PMTB tidak signifikan mempengaruhi variabel belanja modal.

4.4.3. Uji Koefisien Determinasi R² dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien determinasi R² dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya (Tabel 9).

Tabel 9. Uji R² dengan Variabel yang Signifikan

Koefisien determinasi	KBI	KTI
R-squared	0.989403	0.976718
Adjusted R-squared	0.987303	0.972105

Sumber: BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Untuk KBI, sebesar 98,9 persen dari Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAK, DAU, DBH, PPD dan PMTB, sedangkan sisanya sebesar 1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
- Untuk KTI, sebesar 97,6 persen dari Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAK, DAU, DBH, PPD dan PMTB, sedangkan sisanya sebesar 2,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.4.4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

- **KBI**

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\text{BLBMODAL}+2) &= 0.539746141732 * \text{LOG}(\text{PAD}+2) + \\ &0.0796531682372 * \text{LOG}(\text{DAK}+2) + 0.000769227579566 * \text{LOG}(\text{DAU}+2) + \\ &0.194165509255 * \text{LOG}(\text{DBH}+2) + 0.239781304503 * \text{LOG}(\text{PPD}+2) + \\ &0.205151001737 * \text{LOG}(\text{PMTB}+2) - 1.89921737672 + [\text{CX}=\text{F}] \end{aligned}$$

- **KTI**

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\text{BLBMODAL}+2) &= 0.184821202183 * \text{LOG}(\text{PAD}+2) + \\ &0.194304283275 * \text{LOG}(\text{DAK}+2) + 0.0891390850059 * \text{LOG}(\text{DAU}+2) + \\ &0.040408526169 * \text{LOG}(\text{DBH}+2) + 0.173179146606 * \text{LOG}(\text{PPD}+2) + \\ &0.230190080531 * \text{LOG}(\text{PMTB}+2) + 0.884395826007 + [\text{CX}=\text{F}] \end{aligned}$$

Tabel 10. Interpretasi Persamaan Regresi

No	Variabel	KBI		KTI	
		Signifikan	Hubungan antar variable	Signifikan	Hubungan antar variable
1.	PAD	Ya	Ada hubungan searah (positif) yaitu perubahan 1 persen dalam PAD akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.539746 persen	Ya	Ada hubungan searah (positif) yaitu perubahan 1 persen dalam PAD akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.184821 persen
2	DAK	Ya	Ada hubungan searah (positif), yaitu perubahan 1 persen dalam DAK akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.079653 persen	Ya	Ada hubungan searah (positif), yaitu perubahan 1 persen dalam DAK akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.194304 persen
3	DAU	Tidak	Ada hubungan searah (positif), yaitu perubahan 1 persen dalam DAU akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.000769 persen	Tidak	Ada hubungan searah (positif) yaitu perubahan 1 persen dalam DAU akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.089139 persen
4	DBH	Ya	Ada hubungan searah (positif), yaitu perubahan 1 persen dalam DBH akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.194166 persen	Tidak	Ada hubungan searah (positif) yaitu, perubahan 1 persen dalam DBH akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.040409 persen
5	Penerimaan Pembiayaan Daerah (PPD)	Ya	Ada hubungan searah (positif), yaitu perubahan 1 persen dalam penerimaan pembiayaan daerah akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.239781 persen	Ya	Ada hubungan searah (positif) yaitu, Perubahan 1 persen dalam penerimaan pembiayaan daerah akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.173179 persen

6	PMTB	Tidak	Ada hubungan searah (positif), yaitu kenaikan 1 persen dalam PMTB akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0.205151 persen	Tidak	Ada hubungan searah (positif) yaitu, perubahan 1 persen dalam PMTB akan mengubah Belanja Modal sebesar 0.230190 persen
---	------	-------	---	-------	--

Sumber: BPS, Diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif antara PAD, DAK, dan penerimaan pembiayaan daerah dengan alokasi belanja Modal pemerintah daerah baik di KBI dan KTI. Artinya, jika PAD bertambah maka mengakibatkan penambahan alokasi belanja modal. Bagi provinsi di KBI, pengaruh PAD memiliki porsi terbesar terhadap perubahan belanja modal. Setiap 1 persen kenaikan PAD akan menambah alokasi belanja modal sebesar 0,54 persen. Sementara bagi provinsi di KTI, dampak kenaikan 1 persen PAD hanya menambah alokasi belanja modal sebesar 0,18 persen. Jika dibandingkan dengan total pendapatannya, provinsi di KBI memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 14,8 persen dibandingkan provinsi di KTI yang hanya memiliki rasio sebesar 6,63 persen. Ini menunjukkan bahwa untuk belanja modal di KBI, rata-rata provinsi mengandalkan dari PAD. Data rata-rata alokasi PAD periode tahun 2010-2017 untuk propinsi di KBI jauh lebih besar dibandingkan provinsi di KTI yaitu masing-masing sebesar Rp3.300,19 dan Rp808,53 miliar.

Sementara untuk KTI, alokasi belanja modal lebih mengandalkan DAK yang memiliki kontribusi sebesar 0,19 persen, yang memiliki rata-rata alokasi sebesar Rp1.334,11 miliar. Berikut nilai koefisiensi variabel PAD, DAK, DAU, DBH, PPD, dan PMTB terhadap belanja modal yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dan signifikansinya terhadap variabel belanja modal (Tabel 11).

Tabel 11. Ranking Nilai Koefisiensi Variabel

Kawasan Barat Indonesia				Kawasan Timur Indonesia			
Urutan	Variabel	Nilai Variabel	Ket	Urutan	Variabel	Nilai Variabel	Ket
1	PAD	0,539746	S	1	DAK	0,194304	S
2	PPD	0,239781	S	2	PAD	0,184821	S

3	DBH	0,194166	S	3	PPD	0,173179	S
4	DAK	0,079653	S	4	PMTB	0,23019	TS
5	PMTB	0,205151	TS	5	DAU	0,089139	TS
6	DAU	0,000769	TS	6	DBH	0,040409	TS

Ket: S (signifikan) TS (tidak signifikan)

Sumber: BPS, diolah

- Ada hubungan positif antara DAU dengan alokasi belanja modal namun tidak secara signifikan mempengaruhi belanja modal bagi pemerintah daerah di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Meskipun penggunaan DAU bersifat *block grant*, namun dalam prakteknya alokasi DAU sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Komponen belanja pegawai memang memiliki bobot tertentu dalam perhitungan alokasi DAU suatu daerah. Inilah yang membuat daerah beranggapan bahwa DAU khusus dialokasikan untuk memenuhi belanja pegawai (Tabel 12).

Tabel 12. Rata-rata Alokasi dan Rasio Variabel Independen

Rata-rata alokasi (miliar Rp)	KBI	KTI	Rata-rata Rasio (persen)	KBI	KTI
TotPend	22.341,57	12.193,88			
PAD	3.300,19	808,53	PAD/Totpend	14,8%	6,63%
DAPER	14.747,54	9.484,93	DAPER/Totpend	66,0%	77,78 %
DAU	10.826,75	6.532,84	DAU/Totpend	48,5%	53,57 %
DAK	1.750,76	1.334,11	DAK/Totpend	7,8%	10,94 %
DBH	2.173,39	1.617,99	DBH/Totpend	9,7%	13,27 %
PPD	2.475,68	1.269,01	PPD/Totpend	11,1%	10,41 %
TotBel	24.424,46	13.462,89			
BM	4.743,20	3.286,11	BM/Totbel	19,4%	24,41 %
PMTB	99.779,02	29.584,04	PMTB/PDRB	28,9%	30,95 %

Sumber: BPS, diolah

- DBH memiliki hubungan positif dan signifikan mempengaruhi alokasi belanja modal di propinsi KBI, namun pengaruhnya tidak signifikan di propinsi KTI. Data rata-rata alokasi DBH untuk propinsi KBI sebesar Rp2.173,39 miliar atau 74 persen lebih tinggi dibanding rata-rata alokasi DBH di propinsi KTI yang sebesar Rp1.617,99 miliar. Namun, jika dilihat dari proporsinya, propinsi di KTI sangat mengandalkan DBH, dimana kontribusinya terhadap pendapatan daerah mencapai 13,27 persen dibandingkan dengan propinsi di KBI yang

kontribusinya sebesar 9,7 persen. DBH merupakan dana transfer pusat ke daerah yang berasal dari sumber daya alam (migas dan nonmigas). Umumnya daerah di wilayah KTI minim akan sumberdaya, khususnya migas, sehingga sulit bagi daerah ini untuk meningkatkan porsi alokasinya, dibanding wilayah KBI yang umumnya merupakan daerah penghasil.

4. Pembiayaan Penerimaan Daerah (PPD) memiliki hubungan positif dan signifikan mempengaruhi alokasi belanja modal. Secara umum porsi pembiayaan penerimaan daerah di propinsi KBI dan KTI berkisar antara 10 persen hingga 11 persen terhadap total pendapatan daerah. PPD ini dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maupun dari piutang daerah. Penggunaannya menjadi diskresi pemerintah daerah, namun umumnya digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah.
5. PMTB memiliki hubungan positif namun tidak signifikan mempengaruhi belanja modal di daerah KBI dan KTI. PMTB merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. Investasi ini dapat berasal dari sektor pemerintah maupun swasta yang sebagian besar dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi melalui PMDN atau PMA sebagian besar sifatnya tidak menambah aset daerah dan pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengalokasikan belanja modal untuk biaya pemeliharaan atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model yang layak digunakan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAK, DAU, DBH, PPD dan PMTB terhadap Belanja Modal baik di daerah KBI dan KTI adalah *Fixed Effect Model*.
2. Seluruh variabel independen yang diteliti berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah di KBI dan KTI.
3. DAU dan PMTB memiliki hubungan yang positif namun tidak secara signifikan mempengaruhi belanja modal di daerah KTI dan KBI.

5.2. Rekomendasi

Untuk mencapai proporsi belanja modal sebesar 30 persen dari total belanja daerah sesuai dengan target RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah perlu memberikan penekanan khusus dalam pengalokasian dana transfer pusat ke daerah. Bagi daerah di kawasan timur Indonesia, pemerintah perlu memperbesar alokasi DAK dan mendorong peningkatan PAD. Kesenjangan infrastruktur dapat menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan perhatian khusus bagi kawasan timur Indonesia melalui pengalokasian dana yang bersifat *specific grant* seperti DAK. Bidang-bidang DAK diprioritaskan bagi upaya peningkatan pelayanan publik, sehingga dampaknya dapat mendorong ekonomi daerah dan meningkatkan PAD daerah.

Peningkatan PAD perlu menjadi prioritas utama di daerah kawasan barat Indonesia karena memiliki dampak yang besar bagi peningkatan belanja modal di kawasan tersebut. Secara rata-rata rasio belanja modal di KBI masih lebih rendah dibandingkan KTI yaitu sebesar 19,4 persen terhadap total belanja daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, berbagai tahun. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekananda, Makyus (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. Leaflet Dana Alokasi Umum. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- _____. Leaflet Dana Bagi Hasil. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- _____. (2014). Deskripsi dan Analisis APBD 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- _____. (2014). Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- _____. (2014). Postur APBN Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. Peta Kapasitas Fiskal Berbagai Tahun. Kementerian Keuangan RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.